



PERAN GURU PPKN DALAM MEMBENTUK WARGA NEGARA DEMOKRATIS DI ERA DIGITAL

Moh. Dwi Prayoga¹, Dewi Kurniasari², Linda Finatalia³, Irawan Hadi Wiranata⁴.

Universitas Nusantara PGRI Kediri

muhamaddwi119@email.com¹, dewikurniandasari99@gmail.com²,
lindafinatalia845@gmail.com³, wiranata@unpkdr.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to deeply understand the role of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers in shaping the character of democratic citizens in the community. The research approach used is qualitative with a literature study method, which focuses on teachers and students in the Civics learning process. Data collection is done through literature study. In the context of learning, Civics teachers not only carry out their role as material deliverers, but also as facilitators in instilling democratic values through learning activities that familiarize dialogue, deliberation, and strengthening attitudes of tolerance and responsibility. Teacher role modeling, the use of participatory learning strategies, and the integration of Pancasila values in school life are important elements in efforts to form democratic awareness in students. The role of Civics teachers in this case is understood as a crucial element in creating a learning environment that is able to foster the character of citizens who are aware of their rights and obligations and have the ability to actively participate in democratic life.

Keywords: civics teacher, democratic citizen, civic education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis di lingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada guru dan siswa dalam proses pembelajaran PPKn. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Dalam konteks pembelajaran, guru PPKn tidak hanya menjalankan peran sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan pembelajaran yang membiasakan dialog, musyawarah, serta penguatan sikap toleransi dan tanggung jawab. Keteladanan guru, penggunaan strategi pembelajaran partisipatif, dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah menjadi unsur penting dalam upaya pembentukan kesadaran demokratis pada diri siswa. Peran guru PPKn dalam hal ini dipahami sebagai elemen krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu menumbuhkan karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Kata Kunci: guru PPKn, warga negara demokratis, pendidikan kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta budaya bangsa, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Satria Aji et al., 2022). Tujuan pendidikan ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa



kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, kreatif, mandiri, serta mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal tersebut, penting bagi setiap individu untuk memahami nilai-nilai demokrasi (Helena et al., 2023). Warga negara diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari identitasnya sebagai pribadi yang demokratis. Nilai sendiri merupakan sesuatu yang dianggap berharga dan mencerminkan kualitas yang berguna bagi manusia (Rosmawardani & Patmisari, 2023).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat menjadi landasan moral dan ideologi yang kokoh bagi bangsa Indonesia (Prayoga et al., 2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia berperan krusial dalam memperkokoh persatuan bangsa, mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif, dan mewujudkan masyarakat yang adil secara sosial (Prayoga et al., 2024). Melalui Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa sosial, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa dan negara (Rosmawardani & Patmisari, 2023). Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai demokratis kepada generasi muda. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai bagian dari kurikulum nasional tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan hukum, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran politik, sikap kritis, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Bhughe, 2022).

Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara terstruktur, sadar, dan terencana melalui proses pembelajaran yang bertujuan menciptakan suasana demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi topik yang relevan dan menarik untuk dikaji (Rahmayanti, 2023). Sebagai pelaksana utama dalam proses pendidikan, guru memiliki posisi sentral dalam membentuk karakter siswa. Guru PPKn khususnya memegang tanggung jawab penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah, kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesetaraan hak serta kewajiban (Bhughe, 2022a). Peran ini menjadi semakin penting di tengah tantangan zaman yang ditandai dengan meningkatnya apatisme politik, polarisasi sosial, serta melemahnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana guru PPKn menjalankan perannya dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Satria A. et al., 2022).



Guru memiliki peran dan fungsi yang penting sebagai agen pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya dalam memotivasi siswa untuk mengalami perubahan yang bermakna, terutama dalam hal pengembangan kecerdasan moral (Pratiwi & Trisiana, 2020). Namun justru dalam konteks inilah peran guru PPKn diuji, bagaimana ia mampu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam lingkungan belajar yang pragmatis, sekaligus menumbuhkan kesadaran berbangsa di kalangan siswa yang akan segera terjun ke dunia kerja (Sugara & Mutmainnah, 2020).

Penelitian ini digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan guru PPKn di lingkungan masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai pendidik nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik pendidikan demokrasi di lapangan, serta untuk merumuskan strategi pembelajaran kewarganegaraan yang lebih efektif, relevan, dan kontekstual. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menyentuh realitas sosial yang dihadapi peserta didik di era modern.

PEMBAHASAN

Aspek	Deskripsi Peran Guru PPKn	Implikasi Terhadap Pembentukan Warga Negara Demokratis
Pendidikan Nilai Demokrasi	Guru menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan melalui pembelajaran berbasis dialog	Siswa terbentuk menjadi individu yang menghargai hak asasi, perbedaan pendapat, dan mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Digital	Guru memanfaatkan platform <i>digital (e-learning, media sosial, aplikasi pembelajaran)</i> sebagai media penyampaian materi PPKn yang interaktif dan kontekstual.	Membentuk literasi digital siswa serta meningkatkan kesadaran terhadap etika berinternet dan tanggung jawab digital.
Penguatan Pendidikan Karakter	Guru berperan dalam membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, toleran, dan bertanggung jawab melalui integrasi nilai-nilai	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial siswa sebagai bagian dari warga negara yang baik.



	karakter dalam proses pembelajaran.	
--	-------------------------------------	--

Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa guru PPKn memainkan berbagai peran strategis dalam membentuk warga negara yang demokratis, khususnya di era digital yang sarat tantangan dan informasi cepat. Peran tersebut mencakup penyampaian nilai-nilai demokrasi secara kontekstual, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, hingga penguatan pendidikan karakter (Myagi Lumbantobing et al., 2025). Guru juga harus mampu menjadi fasilitator yang mendorong diskusi kritis, terutama terhadap isu-isu aktual di dunia digital, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi. Selain itu, guru dituntut menjadi teladan sikap demokratis, karena keteladanan memiliki pengaruh kuat terhadap internalisasi nilai oleh siswa (Cahyani & Anggraeni Dewi, 2021). Guru PPKn di sekolah ini tidak hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan materi pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman teori demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif (Rosmawardani & Patmisari, 2023).

Salah satu peran utama yang dilakukan oleh guru PPKn adalah sebagai fasilitator diskusi dan musyawarah kelas yang memberi ruang bagi siswa untuk mengemukakan pendapat, menghargai pandangan orang lain, dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama (Zikra Putri et al., 2025). Dalam praktiknya, guru PPKn seringkali mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan yang mengasah keterampilan berargumentasi secara logis dan sopan, serta memberikan contoh dalam mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa saling menghargai antar individu, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi (Sulistianingsih et al., 2024).

Selain itu, guru PPKn juga berperan sebagai teladan dalam memperkenalkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan siswa. Dalam hal ini, guru tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mengajak siswa untuk merasakan langsung pentingnya peran serta aktif dalam masyarakat, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan seperti bakti sosial, seminar kewarganegaraan, dan forum diskusi menjadi media bagi siswa untuk mengaplikasikan teori demokrasi dalam kehidupan nyata, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep-konsep abstrak, tetapi juga menghidupkannya dalam perilaku sehari-hari (Prayoga et al., 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa tantangan masih dihadapi oleh guru PPKn dalam menerapkan nilai-nilai



demokrasi di kelas. Salah satunya adalah adanya siswa yang cenderung apatis terhadap isu-isu politik dan sosial, serta kurangnya keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan kelas yang mengedepankan prinsip demokrasi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketertarikan mereka terhadap materi yang dianggap abstrak dan kurang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, guru PPKn perlu lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran yang dapat menghubungkan teori-teori demokrasi dengan situasi kehidupan nyata yang lebih dekat dengan pengalaman siswa, serta mengajak mereka untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang mendorong pengembangan kesadaran politik dan sosial mereka (Prayoga et al., 2025).

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn sangat penting dalam membentuk karakter demokratis siswa (Charlaes Bego, 2016). Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga mencakup pendampingan dalam pengembangan sikap dan perilaku demokratis yang mencakup kemampuan untuk berdialog, menyelesaikan konflik, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, guru PPKn di sekolah ini telah berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi secara efektif, dengan memanfaatkan pendekatan yang berorientasi pada partisipasi aktif siswa serta pembelajaran berbasis pengalaman.

Guru berperan sebagai pemberi semangat dalam proses pembelajaran, dengan tujuan membangkitkan motivasi belajar siswa sesuai dengan konteks materi yang diajarkan. Sebagai pendidik, guru bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan dorongan, serta melakukan pengawasan dan pembinaan agar siswa mematuhi aturan-aturan sekolah serta norma yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan aktivitas siswa agar tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang telah ditetapkan (Rosmawardani & Patmisari, 2023).

Salah satu konkret tanggung jawab ini tercermin dari upaya guru PPKn dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui metode pembelajaran dialogis. Berdasarkan kajian literatur, guru mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan gagasan, menerima keberagaman pandangan, serta berlatih mengambil keputusan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai demokrasi tidak sekadar menyampaikan prinsip-prinsip seperti keadilan atau kesetaraan secara teksual, melainkan juga bagaimana membiasakan siswa mengalami langsung praktik-praktik demokrasi dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Melalui pendekatan dialogis dan suasana kelas yang inklusif, guru membantu siswa untuk mengembangkan pola pikir kritis dan sikap toleran. Sikap-sikap ini penting untuk ditanamkan sejak di bangku sekolah karena menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.



Selain menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui interaksi langsung di kelas, guru PPKn juga memanfaatkan kemajuan teknologi digital sebagai sarana untuk menyampaikan materi yang lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa. Studi literatur menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis digital seperti e-learning, media sosial, dan aplikasi pembelajaran interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar (Rahmayanti, 2023). Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai medium yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, terutama dalam memahami isu-isu kewarganegaraan yang bersifat aktual dan dinamis.

Menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui proses motivasi dan pengawasan, guru PPKn juga mengoptimalkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa saat ini. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dinilai mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran karena sifatnya yang lebih interaktif dan fleksibel. Penggunaan *platform* digital seperti video pembelajaran tematik, aplikasi pembelajaran, dan bahan ajar berbasis multimedia memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi siswa (Kirom & Aryaningrum, 2021). Temuan ini mengungkap bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, melainkan menjadi medium esensial untuk menyampaikan materi demokrasi dengan cara yang lebih menarik.

Guru juga dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu aktual seperti berita hoaks, perundungan digital, atau konflik sosial yang ramai diperbincangkan di media. Dengan pendekatan ini, siswa diajak untuk menganalisis peristiwa secara kritis dan belajar memahami nilai-nilai demokrasi melalui kenyataan yang mereka temui sehari-hari (Salsabila, 2024). Lebih jauh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran PPKn juga mendukung penguatan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Melalui simulasi digital dan video edukatif, guru dapat menanamkan sikap saling menghargai dalam konteks multikultural di kelas (Lathifah, 2024).

Meskipun demikian, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran tidak luput dari berbagai kendala. Minimnya infrastruktur pendukung dan kesiapan pedagogis guru seringkali menjadi tantangan utama, khususnya dalam aspek pengembangan materi ajar digital dan manajemen pembelajaran berbasis teknologi (Prayoga et al., 2025). Kondisi ini mengharuskan para pendidik untuk secara berkelanjutan meningkatkan kapabilitas profesionalnya, guna memastikan penyampaian materi yang optimal sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama pembentukan karakter peserta didik (Zuriah, 2020). Oleh karena itu, peran guru tidak hanya sebatas pada penyampaian materi, tapi juga menejelaskan pentingnya literasi digital, bersikap kritis terhadap informasi yang diterima, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik.



Dalam kerangka pembelajaran PPKn, pendidikan karakter menempati posisi sentral sebagai elemen yang terintegrasi secara holistik. Pembentukan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi perlu dibangun secara konsisten dalam kehidupan sekolah, tidak hanya melalui materi pelajaran, tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan yang ditunjukkan guru dalam kesehariannya (Pratiwi & Trisiana, 2020). Guru memiliki peran sentral sebagai figur yang diteladani oleh siswa, dan sikap guru dalam menghadapi perbedaan, bersikap adil, serta menjaga etika dalam komunikasi menjadi cerminan langsung dari nilai-nilai demokrasi yang ingin ditanamkan.

Melalui pembelajaran yang menekankan interaksi sosial, kerja sama kelompok, serta keterlibatan dalam kegiatan sekolah dan masyarakat, siswa dapat belajar menghayati pentingnya gotong royong, empati, dan keterbukaan terhadap keberagaman. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam PPKn juga berkontribusi besar terhadap pembentukan warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara moral dan sosial. (Bhughe, 2022). Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin kompleks dan multikultural.

Meski memiliki peran penting dalam menanamkan nilai demokrasi pada siswa, guru PPKn seringkali menghadapi tantangan dalam pengimplementasiannya. Tantangan dalam implementasi strategi pembelajaran interaktif dan peran guru sebagai fasilitator mencerminkan kesenjangan antara aspirasi pedagogis dan keterbatasan realitas operasional. Keterbatasan sumber daya, waktu, dan dukungan institusional adalah hambatan yang umum, sesuai dengan temuan dari penelitian serupa (Taylor & Bogdan, 1998) dalam (Rizal et al., 2024).

Keterbatasan sumber daya dan waktu, serta kesulitan dalam mengelola diskusi yang efektif, adalah hambatan utama yang dihadapi guru. Temuan ini menggarisbawahi kesenjangan antara idealisme pedagogis dan realitas operasional di banyak sekolah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan institusional dan kebijakan yang memadai, termasuk pengembangan profesional guru dan alokasi waktu belajar yang lebih fleksibel (Rizal et al., 2024).

Penanaman sikap demokratis dikalangan peserta didik menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masih dibutuhkannya pendampingan dan motivasi dari guru. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang peserta didik, baik dari segi bakat, minat, maupun karakteristik individu. Dalam kegiatan seperti diskusi, misalnya, beberapa siswa belum berani menyampaikan pendapat dan belum terbiasa menghargai perbedaan pandangan. Oleh karena itu, kehadiran guru sebagai pendamping sangat diperlukan untuk membimbing siswa agar lebih aktif berdiskusi dan mampu menghargai keberagaman pendapat (Faidah, 2024).

Tantangan guru dalam menanamkan sikap demokratis melalui pembelajaran berdiferensiasi yakni tingginya ego peserta didik sehingga guru



kesulitan dalam mengelola peserta didik yang mempunyai ego yang tinggi terhadap pendapatnya. Sebagaimana pendapat Mujiwati (Cadisa & Dwikristanto, 2022) dalam (Faidah, 2024) yang menyatakan bahwa keegoisan seseorang merupakan dasar dari ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap egois, seperti mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain tidak penting, dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap orang lain.

Guru PPKn menghadapi berbagai tantangan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran di kelas. Tantangan tersebut mencakup keragaman karakter siswa, perbedaan kemampuan dalam menyerap materi, serta perilaku yang mengganggu seperti memotong pembicaraan, berteriak, dan tidak memperhatikan jalannya pelajaran. Perbedaan karakter menjadi salah satu kendala utama karena setiap siswa memiliki latar belakang, kepribadian, gaya belajar, serta sudut pandang yang unik. Hal ini berdampak pada dinamika kelas, di mana siswa yang pasif atau kurang percaya diri cenderung enggan menyampaikan pendapat, sementara siswa yang lebih dominan bisa mendominasi diskusi. Keberagaman ini, apabila tidak dikelola dengan tepat, dapat menghambat terciptanya suasana pembelajaran yang demokratis.

Perbedaan dalam kemampuan akademik siswa juga memunculkan persoalan tersendiri. Siswa yang lambat dalam menerima materi pelajaran memerlukan perhatian lebih, agar tidak merasa terpinggirkan dalam proses belajar. Dalam konteks demokrasi, setiap peserta didik seharusnya mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan berpartisipasi. Ketika siswa tidak mampu mengikuti diskusi atau proses pembelajaran secara optimal, rasa kesetaraan yang menjadi dasar nilai demokrasi dapat terganggu. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses terhadap pengalaman belajar, yang semestinya bersifat inklusif.

Selain itu, perilaku siswa yang tidak mencerminkan sikap demokratis juga menjadi hambatan dalam proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Memotong pembicaraan merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap hak berbicara orang lain, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi seperti saling menghargai dan memberikan ruang bagi semua suara. Kebiasaan berteriak dan tidak memperhatikan selama pembelajaran menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya komunikasi yang sopan dan tertib. Sikap-sikap tersebut tidak hanya mengganggu jalannya diskusi, tetapi juga melemahkan praktik demokrasi di kelas yang seharusnya mengedepankan keterlibatan aktif, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman pendapat.

Dalam proses pembentukan kepribadian siswa, terdapat berbagai hambatan dan tantangan, salah satunya berasal dari faktor lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan karakter peserta didik melalui interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat berperan penting dalam



membentuk sikap dan perilaku siswa. Salah satu faktor utama adalah lingkungan keluarga, yang berfungsi sebagai fondasi awal dalam perkembangan etika, moral, dan akhlak anak. Keluarga tidak hanya menentukan pola perilaku anak, tetapi juga menjadi sumber pendidikan pertama yang memengaruhi seluruh proses pembentukan kepribadian, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah (Mutmainnah, 2019) dalam (Bhughe, 2022b).

Ditengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam menubuhkan demokrasi, hal itu menunjukkan bahwa Interaksi antara lingkungan sekolah dan komunitas dengan pembelajaran demokrasi menggarisbawahi bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak dapat terisolasi dari konteks sosial dan politik yang lebih luas. Keterlibatan siswa ekstrakurikuler dalam kegiatan dan organisasi siswa menunjukkan bahwa pembelajaran demokrasi yang efektif memerlukan lebih dari hanya instruksi di dalam kelas; itu membutuhkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam praktik demokratis yang otentik (Dewey, 1916) dalam (Rizal et al., 2024).

Ini menunjukkan pentingnya sekolah sebagai komunitas belajar, di mana siswa dapat mengalami dan berlatih demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan sekolah. Pentingnya lingkungan sekolah dan komunitas dalam mendukung pembelajaran demokrasi tidak bisa diremehkan. Temuan ini menegaskan pandangan (sumber) bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk pembelajaran akademis tetapi juga ruang untuk praktik demokratis (Rizal et al., 2024).

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, guru PPKn tentu tidak tinggal diam. Seperti yang dilakukan oleh guru PPKn di salah satu SMP, sejumlah solusi diterapkan untuk mengatasi hambatan yang muncul di kelas. Beberapa langkah yang digunakan antara lain adalah memancing keberanian siswa untuk tampil ke depan, mendengarkan pendapat mereka, serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Upaya-upaya ini bertujuan untuk membangun suasana kelas yang mendukung nilai-nilai demokratis.

Langkah awal yang dilakukan adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Suasana ini penting agar siswa merasa dihargai dan tidak takut untuk menyampaikan pendapat. Pemberian pujian atas usaha siswa serta kesempatan yang merata bagi semua peserta didik baik yang aktif maupun pendiam mendorong keberanian mereka dalam menyampaikan ide. Dengan demikian, rasa percaya diri siswa meningkat, yang pada akhirnya memperkuat partisipasi aktif mereka dalam kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya, guru juga membiasakan untuk mendengarkan pendapat siswa secara empatik serta memberikan tanggapan dengan cara yang membangun. Hal ini menanamkan sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap perbedaan pandangan. Selain itu, kegiatan refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam mendorong siswa untuk berpikir kritis,



mengevaluasi proses belajarnya, dan bertanggung jawab terhadap perkembangan diri. Ketiga langkah ini secara keseluruhan tidak hanya mendukung implementasi nilai-nilai demokrasi di sekolah, tetapi juga mengajarkan makna partisipasi, penghargaan terhadap keberagaman, serta pentingnya pengembangan diri secara berkelanjutan (Demokrasi et al., 2023).

Salah satu solusi yang dilakukan guru dalam menanamkan sikap demokratis adalah dengan mendorong kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan secara kolaboratif, serta menanamkan nilai untuk menghargai dan mengakui pendapat setiap individu. Diskusi kelompok menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan peserta didik untuk saling berbagi ide, pandangan, dan pemikiran mengenai suatu topik atau permasalahan. Melalui interaksi yang terarah, siswa dilatih untuk mencapai pemahaman bersama, menyelesaikan masalah secara kolektif, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif, tetapi juga memperkuat sikap saling menghormati dan keterbukaan terhadap perbedaan, yang merupakan inti dari nilai-nilai demokrasi (Faidah, 2024). Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dari berbagai sudut pandang dan pengalaman, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, serta membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas (Humairoh, 2022) dalam (Faidah, 2024).

Adapun strategi penguatan karakter melalui pembelajaran PPKn berbasis proyek atau project citizen dengan tahapan. Pertama, guru memberikan penguatan terkait sikap bernalar kritis dengan membekali materi kompetensi dasar bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas bhineka tunggal ika. Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks ini, guru memegang peran penting dalam membentuk sikap bernalar kritis pada generasi muda. Dengan membekali materi kompetensi dasar tentang bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan berpegang pada asas Bhineka Tunggal Ika, mereka mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan responsif terhadap ancaman serta proaktif dalam mengatasinya adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Strategi pertama yang dilakukan oleh guru PPKn adalah dengan membekali siswa mengenai pengetahuan dasar terkait bidang kewarganegaraan yang sesuai cakupan materi pembelajaran yaitu pada kompetensi dasar bersikap responsi dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhineka Tunggal Ika dengan materi mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui strategi ini, maka siswa dituntut menjadi warga negara yang cerdas dan kritis sebab mereka dapat menjelajah keilmuan secara lebih mendalam serta memperoleh wawasan lebih luas (Ajung et al., 2024).

Kedua, guru memberikan penguatan terkait sikap kerja sama dan gotong royong dalam mencari pemecahan masalah. Seorang guru PPKn



secara cermat membangun penguatan terkait sikap kerja sama dan gotong royong dalam mencari pemecahan masalah. Dengan strategi yang bijaksana, mereka mendorong siswa untuk bekerja sama secara otonom, berinteraksi dalam diskusi, dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang relevan dengan tema permasalahan yang diangkat. Melalui pendekatan ini, siswa diberi motivasi untuk mengeluarkan gagasan dan energi mereka dalam menghasilkan produk Project Citizen. Meskipun kemampuan siswa dalam penalaran dan nilai masih perlu dikembangkan lebih lanjut, namun mereka telah diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara nyata sebagai anggota warga negara yang bernilai. Dengan strategi ini, siswa dapat belajar bernegosiasi, berkolaborasi, dan terlibat secara aktif dalam menciptakan solusi pemecahan masalah yang konkret dan tepat sasaran, sesuai dengan visi Project Citizen yang dipegang teguh oleh Faridli (2011) dalam (Ajung et al., 2024).

Ketiga, guru memberikan penguatan terkait sikap bertanggung jawab dalam pembelajaran project citizen. Guru PPKn memperkuat sikap bertanggung jawab dalam pembelajaran Project Citizen dengan strategi interaktif, melibatkan siswa secara intens dalam diskusi kelompok, memastikan mereka memahami peran dan tugasnya. Hasilnya, siswa menjadi lebih tanggung jawab, antusias, dan gigih, dengan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi yang terasah. Melalui proyek ini, mereka belajar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menciptakan solusi untuk masalah di sekitar mereka. Strategi ketiga dilakukan guru PPKn dengan berkeliling pada setiap kelompok dan bertanya mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa serta memastikan bahwa siswa melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dan bertanggung jawab. Pada startegi ini terjadi interaksi dua arah yang lebih intens antara guru dan siswa. Kegiatan project citizen yang difasilitasi dan dimonitoring oleh guru secara tepat dapat membantu kemampuan siswa untuk memahami, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, melakukan analisis serta menciptakan solusi pemecahan masalah (Putri, 2020) dalam (Ajung et al., 2024).

Keempat, guru memberikan penguatan terkait sikap disiplin dalam pembelajaran project citizen. Strategi keempat yang dilakukan oleh guru PPKn adalah dengan senantiasa membimbing dan mengingatkan siswa terkait tanggung jawab yang mereka miliki. Jika terdapat siswa yang berperilaku disiplin maka guru bertindak dengan memberikan teguran secara halus yang bersifat membangun kedisiplinan dalam diri siswa serta memberikan tindakan lanjutan berupa pengurangan nilai apabila tindakan pertama tidak membawa hasil (Ajung et al., 2024).

Terakhir, guru memberikan penguatan sikap terkait pengembangan kreativitas dan keterampilan intelektual siswa dalam pembelajaran project citizen. Guru PPKn memperkuat sikap terkait pengembangan kreativitas dan keterampilan intelektual siswa dalam pembelajaran Project Citizen dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menciptakan produk proyek se-



kreatif mungkin, sesuai dengan kemampuan mereka. Melalui presentasi produk di depan kelas, siswa mendapatkan pengalaman berharga dalam meyakinkan orang lain akan langkah-langkah pemecahan masalah yang mereka pilih, serta mengasah keterampilan berkomunikasi mereka. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengembangkan kreativitas mereka tetapi juga memperkuat kemampuan intelektual dan sosial mereka melalui pengalaman pembelajaran yang nyata dan berorientasi pada solusi. Strategi kelima ini dilakukan oleh guru PPKn dengan memberikan kebebasan bagi siswa dalam menciptakan produk proyek citizen sekreatif mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempresentasikan produk tersebut di depan kelas (Ajung et al., 2024).

Kemudian terkait demokrasi pada siswa, guru bisa memberikan inovasi "Suara Demokrasi". Proyek Suara Demokrasi merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan siswa, khususnya pada jenjang kelas XI. Melalui proyek ini, siswa dilibatkan dalam simulasi pemilu dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses politik, sehingga mereka memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaannya, guru Pendidikan Pancasila berperan sebagai pengarah sekaligus fasilitator, memastikan bahwa pemahaman siswa terhadap teori demokrasi tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik nyata (Hermansyah et al., 2024). Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif guru yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan teknik pembelajaran yang inovatif dan menarik. Keterlibatan guru dalam kegiatan politik sekolah dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi siswa secara signifikan.

Proyek "Suara Demokrasi" dirancang untuk mengisi celah ini dengan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan demokrasi. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat membangun kesadaran politik yang lebih kuat dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab (Hermansyah et al., 2024).

Proyek suara demokrasi adalah inisiatif atau program yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum atau kegiatan politik lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan warga negara agar lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, membangun kesadaran akan pentingnya hak suara, serta mempromosikan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suara demokrasi merupakan pilar utama dalam memastikan partisipasi aktif warga dalam proses politik yang demokratis" (Setiawan, 2020) dalam (Hermansyah et al., 2024).

Guru PPKn memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran politik siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan nilai-nilai demokrasi. Pada proyek Suara



Demokrasi, guru-guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk memahami pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui diskusi, simulasi pemilu, dan debat, guru mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Selain itu, guru juga mengajarkan bagaimana etika politik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga individu yang bertanggung jawab dalam menyuarakan aspirasi mereka. Dengan bimbingan yang tepat, partisipasi politik siswa meningkat, terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan demokratis yang diselenggarakan di sekolah (Hermansyah et al., 2024).

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran berpolitik serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterlibatan guru dalam proyek ini tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai inspirator yang menanamkan semangat demokrasi dan cinta tanah air kepada siswa. Dengan demikian, peran guru Pendidikan Pancasila sangat vital dalam menciptakan generasi penerus yang aktif, kritis, dan memiliki kesadaran politik yang tinggi, yang merupakan modal utama dalam menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia (Mulyasa, 2020) dalam (Hermansyah et al., 2024).

Kemudian kebaruan yang mengintegrasikan pada keadaan pada saat ini yaitu era digital ada cara guru dalam mengatasi tantangan di era digital saat ini, yaitu dengan pengimplementasian *digital citizenship*. *Digital citizenship* merupakan pengetahuan serta ketrampilan yang digunakan untuk menggunakan teknologi dengan tepat di dunia digital, mengelola resiko yang ada, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan dunia digital secara tepat dan bijak (Putri & Setyowati, 2021). Guru memiliki peran sentral dalam membentuk siswa yang demokratis melalui pembelajaran yang menumbuhkan sikap partisipatif, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks era digital saat ini, peran tersebut semakin relevan dengan adanya tantangan baru yang dihadapi generasi muda di ruang digital, sehingga guru dituntut untuk mengintegrasikan konsep digital citizenship sebagai strategi penguatan karakter. Digital citizenship mencakup pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan teknologi secara tepat, mengelola risiko digital, serta memanfaatkan peluang digital dengan cara yang etis dan bijak.

Dalam konteks kewarganegaraan saat ini terbentuk warga negara baru yaitu warga negara digital (*digital citizen*) yang memiliki ciri perilaku yang berhubungan dengan teknologi, seperti yang dijelaskan oleh Bailey & Ribble dikatakan warga negara digital jika memiliki pengetahuan kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan yang diimbangi dengan pemahaman serta pengetahuan juga ketrampilan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dan informasi (Roza, 2020:198) dalam (Putri &



Setyowati, 2021). Dalam menghadapi perubahan tersebut, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab, kritis, dan beretika dalam menggunakan teknologi.

Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini pengetahuan menjadi warga negara digital yang baik sangat diperlukan, sehingga siswa dapat mengambil hal hal yang positif dan membuang hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dalam memasuki masyarakat di era digital diperlukan pengetahuan dan ketrampilan terutama tentang etika yang harus dimiliki oleh setiap warga negara digital. Pemahaman dalam beretika digital ini diharapkan mampu membuat warga negara digital ke arah yang lebih positif sehingga terwujud good digital citizen. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik gagasannya bahwa era digital membawa kita dalam era baru Pendidikan Karakter, yang ditujukan secara langsung terhadap peluang dan tantangan pada kehidupan gaya hidup digital. Oleh karena itu, salah satu alternatif solusi adalah penerapan Pendidikan Digital Citizenship pada siswa sebagai upaya pembentukan good digital citizen melalui kolaborasi dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah (Putri & Setyowati, 2021).

Sebagai garda terdepan dalam pendidikan kewarganegaraan, guru PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang demokratis dan bertanggung jawab, terlebih di era digital yang sarat dengan tantangan sekaligus peluang. Melalui pendekatan pembelajaran yang adaptif, integratif, dan kontekstual, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi yang mencakup partisipasi aktif, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi digital, guru PPKn juga dituntut untuk membekali siswa dengan literasi digital agar mampu bersikap kritis, bijak, dan etis dalam menggunakan media. Dengan sinergi antara kompetensi pedagogis dan pemanfaatan teknologi secara positif, guru PPKn dapat menjadi agen perubahan yang membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang dalam sikap dan perilaku demokratis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan warga negara demokratis di era digital bukan sekadar tugas kurikulum, melainkan tantangan peradaban yang menuntut peran aktif dan reflektif dari guru PPKn. Studi ini menegaskan bahwa guru PPKn memiliki posisi strategis sebagai agen transformasi nilai-nilai demokrasi, yang tidak hanya ditransmisikan melalui materi pelajaran, tetapi juga ditanamkan melalui keteladanan, dialog kritis, dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Di tengah gempuran informasi digital dan polarisasi sosial yang meningkat, guru PPKn diharapkan mampu membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis, literasi digital, serta kesadaran etis sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran guru tidak lagi terbatas sebagai penyampai pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator



pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PPKn membuka peluang besar untuk memperluas cakrawala berpikir siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik secara fisik maupun di ruang digital.

Ke depan, pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas model pembelajaran PPKn berbasis digital yang berorientasi pada pembentukan karakter demokratis siswa. Selain itu, diperlukan studi lanjutan yang mengintegrasikan konsep *digital citizenship* dalam kurikulum PPKn, sehingga pembentukan warga negara demokratis tidak hanya berhenti pada tataran sikap, tetapi juga pada kompetensi digital yang bertanggung jawab, kritis, dan etis. Dengan demikian, pendidikan PPKn di era digital memiliki potensi besar untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merevitalisasi praktik-praktik kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Peran guru sebagai aktor utama perlu terus didukung melalui pelatihan, inovasi pedagogi, dan kebijakan pendidikan yang progresif dan relevan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajung, A., Alkani, S., & Kasih, R. (2024). *Strategi Penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek*. 4(2), 821–834.
- Bhughe, K. I. (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 113. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.36954>
- Cahyani, K., & Anggraeni Dewi, D. (2021). PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK AGAR MENCIPTAKAN SISWA YANG BERKUALITAS. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 2). <https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Charlaes Bego, K. (2016). PERAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN SISWA. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 235. www.publikasi.unitri.ac.id
- Helena, M., Rahayu¹, S., C², A., Gayatri³, E. A., & Erawan⁴, T. (2023). Peranan Guru PKn untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa sebagai Pemilih Pemula di SMK Veteran 1 Sukoharjo. In *CIVIC EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ)* (Vol. 5).
- Hermansyah, F., Sanusi, A. R., & Susanto, E. (2024). PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA PADA PROYEK SUARA DEMOKRASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK SISWA KELAS XI DI SMAN 5 KARAWANG. *JPKN Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Myagi Lumbantobing, N., Yunita, S., Afrida, A., Siahaan, R., & Erlina Sitompul, Y. (2025). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam



Membentuk Karakter Remaja Masa Kini Universitas Negeri Medan, Indonesia. *Journal of Educational Studies*. <https://ipi-journals.com/index.php/wanua/index>

- Pratiwi, R., & Trisiana, A. (2020). JJBK UNDIKSHA Pentingnya Peran Guru PKn dalam Membangun Moral Anak Bangsa Efektivitas Konseling Cognitive Behavior Teknik Self-Management Untuk Meningkatkan Self Order. *Jurnal Jurusan Bimbingan Konseling Undiksha*, 11(2), 165–177. <https://doi.org/10.23887/jibk.v10i2>
- Prayoga, M. D., Sasmita, W., & Mahendra, A. (2025). Pembelajaran Mendalam : Penekanan Pada Proses Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Penilaian Belajar Siswa. *Journal of Global Humanistic Studies Philosophiamundi.Id e-Issn*, 3(3), 3031–7703.
- Prayoga, Moh. D., Rista, D., Tria Wulan Sari, H., & irfan, A. (2024). Strategi Indonesia dalam Mempromosikan Good Governance di Kawasan Asia Tenggara. *Seminar Nasional Sains, Kesehatan, Dan Pembelajaran 4*.
- Putri, E. M., & Setyowati, Rr. N. (2021). Implementasi Pendidikan Digital Citizenship Dalam Membentuk Good Digital Citizen Pada Siswa Sma Labschool Unesa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 580–594. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n3.p580-594>
- Rahmayanti, E. (2023). Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran PPKn Sebagai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*.
- Rizal, A., Bossowa, U., Info, A., & History, A. (2024). *Peran Guru dalam Menumbuhkan Sikap Demokratis Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. 7, 11579–11584.
- Rizka Nur Faidah1, Rizma Okavanti2, Putri May Maulidia3, Eva Putri Mulyiani4, H. L. K. (2024). Indonesian Research Journal on Education. *Indonesian Research Journal on Education Web*; 4, 550–558.
- Rosmawardani, A. J. A., & Patmisari, P. (2023). Analisis Peran Guru dalam Membangun Nilai-Nilai Demokrasi Siswa melalui Pembelajaran PPKn di MAN 2 Ponorogo. *(Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Satria Aji, D., sugiaryo, & yusuf. (2022). PERAN GURU PPKN DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN NILAI KARAKTER DEMOKRATIS PADA PESERTA DIDIK KELAS IX DI SMP NEGERI 1 MOJOLABAN SUKOHARJO. *JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Sugara, H., & Mutmainnah, F. (2020). PERAN GURU PPKN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA SEBAGAI. *Jurnal FKIP Unipa Surabaya Tahun XVI*, 29.
- Sulistianingsih, ajung, afrinita, Alkani, S., & Kasih, R. (2024). Strategi Penguatan Karakter Demokratis Melalui Pembelajaran PPKn Berbasis Proyek. *Jurnal Citizenship Virtues*.
- Zikra Putri, N., Silalahi, M., Silalahi, R. Y., Telaumbanua, V. K., & Saragih, D. I. (2025). Implementasi Materi Pembelajaran PPKn terhadap Tindakan Demokrasi di MTsN 2 Pematang Siantar Implementation of Civic Education Learning Materials on Democratic Actions at MTsN 2 Pematang Siantar. *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>